

# Capacity And Bureaucratic Culture In Accessibility of Public Information Based On E – Government

**Jaleska Yuktasya Anugrah**

162022000117

Program Studi Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

## PENDAHULUAN

Pelayanan publik berbasis e-Government di Indonesia belum banyak diterapkan, karena pelayanan ini memerlukan pendanaan yang cukup besar, sehingga diperlukan kesiapan sumber daya manusia, aparat pemerintah, dan kesiapan dari masyarakat. Kebijakan penerapan electronic Government (*e-Government*) merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik.

Aksesibilitas informasi publik berbasis e-government merupakan salah satu perhatian serius dari pemerintah pusat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Pemerintah Indonesia Peraturan nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Designs Reformasi Birokrasi.

## PEMBAHASAN

Dalam Indrajit (2004:2) UNDP (*United Nation Development Program*) mendefinisikan *e-Government*, yaitu “*e-Government is the application of information and communication technology (ICT) by government agencies*”. (*e-Government* merupakan aplikasi informasi dan juga komunikasi (ICT) dari pemerintah). Melalui ICT tersebut, masyarakat dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi dengan sesama warga dan dengan pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2009 tentang keterbukaan informasi diatur mengenai hak dan tanggung jawab serta kewajiban masyarakat dan Penyelenggara negara secara berimbang.

Survei pelayanan publik yang dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan-Deputi Pencegahan Korupsi Komisi (2014) menyatakan bahwa integritas pelayanan publik di Indonesia mengalami peningkatan. Informasi tersebut disampaikan secara periodik melalui situs web di Jawa Timur dan Sumatera Selatan berada di urutan kesembilan dengan skor 59,88. Untuk kategori informasi publik yang tersedia di website setiap saat, Jawa Timur menempati urutan pertama dengan skor 73,5 (Komisi Informasi Pusat, 2012). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masalah kualitas pelayanan publik oleh pemerintah, termasuk Kabupaten Sidoarjo.

Aksesibilitas informasi publik dalam penelitian ini adalah member kemudahan kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah melalui website dalam menyampaikan informasi publik. Persentase rata – rata indikator aksesibilitas informasi di kabupaten Sidoarjo keseluruhan sebesar 71.01% yang artinya aksesibilitas informasi berbasis web di Kabupaten

Sidoarjo sudah baik. Kemudian persentase rata – rata kapasitas birokrasi memiliki kategori cukup baik yaitu sebesar 59.85%, faktor yang mempengaruhi adalah kurang memadainya teknologi informasi fasilitas dan layanan pendukung.

Budaya organisasi merupakan pola pola pikir dan perilaku yang efektif dan efisien untuk mengatur perilaku individu dalam organisasi dan hubungannya dengan kualitas layanan yang berorientasi pada masyarakat. Kualitas budaya dalam organisasi diamati melalui fokus pelayanan masyarakat, akuntabilitas staf untuk pemimpin, atasan ke bawahan, komunikasi terbuka, kerja sama dengan tim, dan mampu melakukan organisasi. Hasilnya adalah budaya pelayanan khususnya informasi publik belum maksimal (76.11). Penyebabnya antara lain kurang kerja sama antar tim, kurangnya budaya bersih, dan kepuasan masyarakat tentang pelayanan dari pemerintah yang belum optimal

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bentuk informasi yang diberikan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo untuk mengakses informasi online dengan baik (62,76%), untuk pengembangan dan manajemen e-government adalah bentuk pemerintahan yang akuntabel belum optimal (58,30%), dan pengelolaan informasi bentuk partisipasi dalam pembangunan dari bagian struktur organisasinya, hasilnya belum optimal (51,47%). Kurangnya alokasi anggaran dan penyediaan infrastruktur teknologi komunikasi menjadi hambatan salah satu bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengembangan e-government.

## **REFERENSI**

- Abadi, T.W.; Prajarto, N.; Guntoro, B. (2015). Capacity And Bureaucratic Culture In Accessibility of Public Information Based On E – Government In Sidoarjo, Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Science*. Volume 5, Nomor 6, 1 Juni 2015
- Abadi, Totok Wahyu. (2005). Layanan Informasi Publik Berbasis E-Government untuk Meningkatkan Quality Improvement pelayanan Publik Di Jawa Timur
- Amalia, Endang. (2017). Perkembangan E-Government Indonesia: Analisis Daftar Layanan Publik. *Jurnal Masyarakat Informatika Indonesia*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2017
- Anggana, Yordan Putra; Gani, A. Yuli Andi; Sarwono. (2009). Upaya Pengembangan E - Government Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume 3, Nomor 1, Halaman 80 – 88
- Lestari, Ni Luh Yuni; Bandyah; Wismayanti, Kadek Wiwin Dwi. (2014). Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis E-Government (Studi Kasus Pengelolaan Pengaduan Rakyat Online Denpasar Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Denpasar Tahun 2014). Denpasar, Bali
- Fuadi, A. Iqbal; Marom, AUFARUL. (2015). Implementasi E-Government Melalui Media Informasi Publik Berbasis Website Daerah Di Kabupaten Tegal

- Setiawan, Agus; Sugiana, Danang; M. Narotama, Jimmi. (2013). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 1, Nomor 2, Halaman 196 – 205
- Merina, Citra Indah; Verawaty. (2015). Aksesibilitas Informasi Publik Pemerintah Provinsi Di Indonesia (Telaah Penerapan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Susena, Edy; Lestari, Dewi Amelia. (2016). Efektivitas Penerapan Electronic Government Terhadap Pelayanan Publik Di Kabupaten Sragen. *Jurnal SAINSTECH Politeknik Indonusa Surakarta*, Volume 2, Nomor 6, Halaman 56 - 63
- Mustafid; Sugiharto, Aris. (2014). Analisa Implementasi E - Government Untuk Pelayanan Publik Di Kota Semarang. *Riptek*, Volume 8, Nomor 2, Halaman 35 - 50
- Nugroho, Trisapto Wahyudi Agung. (2016). Analisis E-Government Terhadap Pelayanan Publik Di Kementerian Hukum Dan Ham (*Analysis of E-Government To Public Services In The Ministry Of Law And Human Rights*). *JIKH*, Volume 10, Nomor 3, Halaman 279 – 296
- Hardjaloka, Loura. (2014). Studi Penerapan E-Government Di Indonesia Dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik (Implementation Study On E-Government In Indonesia And Other Countries As A Solution In Eradicating Corruption In Public Sector). *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 3, Nomor 3, Halaman 435 – 452
- Risnandar. (2014). Analisis *E-Government* Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah. *e-Jurnal Katalogis*, Volume 2, Nomor 7, Halaman 192 – 199
- Karniawati, Nia; Rahmadani, Romi. (2016). Analisis Kebijakan Penerapan E – Government Melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) (Suatu Studi Pada Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat). *Majalah Ilmiah Unikom*, Volume 7, Nomor 2, Halaman 233 – 248
- Yana, Mely. (2015). E-Government Pemberdayaan Desa Sangunratu Dan Potensi Desa Berbasis Web. *Jurnal Sistem Informasi STMIK Pringsewu*
- Wahyudi, Sri Eko; Pinandito, Aryo; Saputra, Mochammad Chandra. (2017). Penilaian Kualitas Website E-Government Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dengan Dimensi E-Govqual (Studi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kota Probolinggo). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, Volume 1, Nomor 2, Februari Tahun 2017, Halaman 108 - 117